

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini seluruh data yang telah didapatkan selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaksana kegiatan, studi kepustakaan dan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian.

Di Kota Semarang masalah Pengaturan dan Pembinaan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pembangunan di segala sektor kehidupan yang semakin pesat dalam wilayah kota Semarang banyak mempengaruhi dan menimbulkan berbagai perubahan yang menyangkut keadaan lingkungan yang semakin padat dengan adanya PKL yang tersebar di mana-mana. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh adanya PKL yang melanggar berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang, misalnya: pendirian kios PKL di atas tanah negara, pendirian warung tenda di atas trotoar, merombak kios tanpa ijin kepada pihak yang berwenang, tidak ada ijin tertulis serta jual beli lahan yang akhir-akhir ini semakin marak dipermasalahkan, karena jual beli lahan tersebut sulit untuk dibuktikan. Hal-hal semacam inilah yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut, dengan harapan agar ke depan penataan PKL di Kota Semarang dapat berlangsung lebih asri, nyaman dan aman.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, selama ini tingkat keberhasilan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, bisa dikatakan rendah. Rendahnya efektivitas dalam implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL ini ternyata dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan seperti belum adanya sosialisasi yang mantap, rendahnya kesadaran PKL yang masih, petugas sosialisasi yang kurang tepat, petugas penertiban dan penegakan hukum yang kurang disiplin, di samping juga kurang pedulinya masyarakat mengenai keberadaan PKL yang melanggar peraturan, serta kekurangan dan kelemahan lain yang menyertainya.

Kondisi ini terjadi di Kecamatan Semarang Timur, yang merupakan salah satu dari daerah padat atau di jantung-jantung kota di Kota Semarang, yang justru para PKL ini mendirikan tenda-tenda baik non-permanen maupun semi permanen, seperti di Jl. Ciliwung, Jl. Citarum, Jl. Rejosari hingga sebelah utara Jl. Kartini, dan lain-lain dan bahwa juga banyak yang sudah masuk ke kampung-kampung, yang secara normatif bukan kawasan peruntukan berdagang PKL.

Merebaknya PKL di Kecamatan Semarang Timur sudah menjadi permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut kalau tidak segera di atasi dengan tegas. Sehubungan itu dibutuhkan suatu kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL yang mampu menata sekaligus membimbing PKL agar dapat hidup dan berkembang dengan teratur dan tertib tanpa mengganggu kepentingan umum, khususnya di perkotaan, kebijakan tersebut disosialisasikan untuk mendukung lebih lanjut program pembinaan PKL yang telah berjalan selama ini.

Sesuai dengan kondisi empiris, maka terhadap beberapa fenomena penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab pendahuluan yang kurang relevan dengan verifikasi faktual di lapangan ditiadakan atau dilakukan penggabungan dengan fenomena lain yang memiliki asosiatif.

#### **4.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur**

Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 merupakan program pembinaan PKL yang menganut pendekatan kemanusiaan dan meminimalisasi bentuk kekerasan dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini sebagai suatu kecenderungan untuk melindungi keberadaan masyarakat kecil dalam berusaha sehingga selama ini pemerintah lebih cenderung menggunakan cara-cara yang lebih lunak dalam menghadapi masalah PKL ini. Cara tersebut antara lain terwujud dalam bentuk pengaturan dan pembinaan kepada PKL yang kesemuanya diserahkan pada masing-masing Pemerintah Kota untuk menyusun dan melaksanakannya. Di Kota Semarang sendiri di mana masalah Pengaturan dan Pembinaan PKL diatur dalam kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari Program pembinaan PKL merupakan Program Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

Meningkatkan kesadaran PKL dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan menaati peraturan lain yang ditetapkan Pemerintah.

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan ketertiban PKL dalam menjalankan kegiatannya.

- b. Meningkatkan peran serta PKL dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Meningkatkan kesadaran PKL dalam membayar retribusi.

Sasaran dari program ini adalah PKL yang menggunakan lahan milik pemerintah atau pihak lain. Adanya kebijakan tersebut, diharapkan PKL yang menggunakan lahan atau tanah milik pemerintah atau lahan yang bukan peruntukannya untuk kegiatan berdagang dapat secara sadar dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan kewajibannya dalam menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Menurut Sri Munarti, salah seorang nara sumber PKL di Kelurahan Kemijen, “satu-satunya permasalahan jumlah lahan itu sangat kurang, lahan itu sangat penting buat para PKL, dengan jalan berdagang kaki lima mereka bisa bertahan hidup. masyarakat Semarang banyak sekali yang jadi PKL, tapi lahan masih sedikit paling tidak dibukalah satu lokasi baru sehingga banyak PKL mungkin dari luar juga bisa buka usaha di sini untuk membantu menghidupkan kota ini”. Melihat begitu besarnya jumlah PKL tersebut, maka dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di Kecamatan Semarang Timur merupakan hal yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan program tersebut.

Pendelegasian kewenangan pemerintah kota ke kelurahan untuk urusan pembinaan dan penertiban serta kecamatan untuk urusan perijinan dan penegakan hukum, dalam pelaksanaan program Pembinaan PKL ini, menjadikan kegiatan dari implementasi Perda dimaksud berbeda-beda antara setiap kelurahan dan

kecamatan. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah kota tidak memiliki tanggungjawab dalam pembinaan PKL di tiap-tiap kelurahan dan kecamatan. Oleh sebab itulah dibuat Perda, dalam pelaksanaan program pembinaan PKL yang mengatur tentang batas penempatan, kriteria dan lokasi dan sanksi bagi PKL yang melanggar.

Realisasi dari implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur selama ini antara lain berupa kegiatan melokalisasi penampungan PKL dalam suatu tempat, pengarahan dari petugas dengan mendatangi satu persatu maupun secara kolektif para PKL dikumpulkan dan diberi pengarahan. Selain itu juga diadakan kegiatan-kegiatan pendataan PKL, pengorganisasian PKL dalam suatu wadah tertentu dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, selama ini implementasi kebijakan program pembinaan PKL bisa dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya PKL yang tidak teratur, kebersihan yang rendah dan adanya jual beli lahan yang seharusnya memang tidak diperbolehkan. Selain itu dampak lain adalah kurang terorganisasinya PKL dalam suatu wadah tertentu sehingga banyak terjadi gesekan-gesekan horisontal antar PKL dengan PKL yang lain dan juga dengan pihak lain selain PKL, seperti masyarakat setempat.

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini di masing-masing kelurahan dan kecamatan ini ternyata dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan seperti belum adanya sosialisasi yang mantap, rendahnya

komunikasi dan informasi dari PKL, rendahnya pengawasan petugas, banyaknya PKL yang belum terdata, selain juga rendahnya tingkat pendidikan PKL, kemampuan aparat pelaksana program, partisipasi pedagang yang kurang mendukung, dan faktor-faktor lainnya.

Rendahnya tingkat komunikasi kebijakan ini, dari aparat kelurahan/kecamatan kepada PKL menyebabkan kurangnya informasi kepada pedagang mengenai ketentuan maupun kewajiban pedagang yang harus ditaati. Pendataan dan pengarahan yang dilakukan petugas dianggap sebagai peningkatan retribusinya. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya karena komunikasi yang kurang baik yang dilakukan petugas terhadap PKL dan kemampuan dari aparat pelaksana untuk mendukung program pengaturan dan pembinaan PKL.

Dalam regulasi tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah:

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 menyatakan:

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:

1. Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil: Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.
2. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Terjadinya perbedaan persepsi antara PKL dengan aparat terhadap upaya yang dilakukan aparat dalam menertibkan PKL di Kecamatan Semarang Timur ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan sudut pandang antara keduanya dalam memaknai kebebasan berdagang. Bagi pihak PKL, selaku warga negara mereka merasa memiliki hak ekonomi sebagaimana dijamin konstitusi untuk melakukan berdagang di mana saja, sementara bagi pihak aparat kebebasan berdagang bagi warga negara sangat dibatasi oleh kebebasan warga negara lain untuk memperoleh pelayanan Pemerintah Kota Semarang tentang lingkungan sosial yang asri, indah, bersih, nyaman dan aman dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang seringkali melekat pada julukan PKL yang diibaratkan selalu kurang bisa tertib menjaga pemenuhan hak dan kewajiban mereka selaku PKL.

Dengan adanya beberapa ketentuan di atas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun di dalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di

trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

Dalam hal ini perlu dilakukan upaya lebih serius, dan perbaikan di kedua belah pihak, di mana aparat dalam menjalankan fungsinya dalam penyuluhan dan pembinaan dibekali dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Sedangkan bagi pihak PKL dituntut untuk lebih menyadari bahwa lahan yang digunakannya untuk berdagang tersebut, bukan sepenuhnya hak milik mereka, karena publik lain pun harus dijaga kepentingannya atas lahan yang digunakannya, untuk senantiasa menjaga kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usahanya. Dengan demikian, PKL dituntut kesadaran dan partisipasinya dalam menggunakan ruang publik (*public sphere*) tersebut, bahwa lahan yang ditempatinya tersebut hanya merupakan hak guna yang bersifat sangat temporer dan memiliki implikasi hukum publik.

Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh aparat selama ini terhadap keberaaan PKL melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2000, berpotensi bersinggungan dengan peraturan hukum lainnya, di antaranya adalah dengan Undang-Undang tentang HAM, yang mengatur:

1. Hak-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran

Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangat tidak manusiawi.

Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata di dalam melakukan penertiban



sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Di antaranya berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi : perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- d. Pasal 40 berbunyi: setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pemerintah di dalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat di dalam hukum perdata. Adapun ketentuan yang diatur di dalam hukum pidana adalah:

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Perdatanya adalah Pasal 1365 berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bagaimana kita mau menegakkan suatu hukum dan keadilan, ketika cara (metode) yang dipergunakan justru melawan hukum. Apapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL, dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak. Pemerintah belum pernah memberikan suatu jaminan yang

pasti bahwa ketika para PKL ini di gusur, mereka harus berjualan di tempat sepertiapa. Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi para PKL tersebut, ternyata bukanlah suatu pusat perekonomian.

Sekarang ini penguasaan pusat kegiatan perekonomian justru diberikan pada pasar-pasar hipermart atau pasar modern dengan gedung yang tinggi serta ruangan yang ber AC. Para pedagang kecil hanya mendapatkan tempat pada pinggiran-pinggiran dari kegiatan perekonomian tersebut.

Dalam rangka untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang semakin menjamur, Surat Keputusan Walikota Semarang No. 130.2 /339 tanggal 5 Agustus 2000 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Pemerintah Kota Semarang kepada kelurahan. Jumlah Pedagang Kaki Lima di hampir semua kelurahan semakin bertambah dengan alasan tuntutan perekonomian mereka. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut di antaranya adalah guna memberikan landasan hukum dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi Kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat. Sasaran dari Peraturan Daerah tersebut adalah para Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada Pasal 6 berbunyi:

Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan;
- b. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima;

- c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Kewajiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah

Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 adalah:

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan.
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- c. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- d. Menempati sendiri tempat usaha Pedagang Kaki Lima sesuai ijin yang dimilikinya.
- e. Menyerahkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 8 berbunyi:

Untuk melakukan, kegiatannya Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. Merombak, menambah, merubah fungsi dan fasilitas lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah
- b. Mendirikan bangunan permanen di lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan.
- c. Memindahtangankan ijin tempat usaha Pedagang Kaki Lima kepada pihak lain.
- d. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan.
- e. Menempati lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- f. Menempati lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Selain itu keberadaan pedagang kaki lima juga didukung adanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 161.1/286 tanggal 2 Juli 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pengelola Pedagang Kaki Lima Kota Semarang dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota

Semarang. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai pada tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima.

Bimbingan dan pembinaan yang diberikan Dinas Pasar selaku pelaksana dari Pemerintah Kota Semarang terhadap Pedagang Kaki Lima, diharapkan Pedagang Kaki Lima dalam jangka waktu tertentu akan bersedia dan mampu pindah di pasar–pasar, pertokoan atau tempat–tempat yang telah disediakan Pemkot sesuai dengan jenis dagangannya, sehingga Pedagang Kaki Lima tidak tumbuh dengan liar. Namun demikian walau telah ada peraturan tentang Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, ternyata masih terdapat banyak permasalahan yang muncul.

Program Pengaturan dan Pembinaan PKL, dalam Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 ini merupakan realisasi dari Perda Kotamadya Dati II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah Pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau untuk mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak lain. Dalam kenyataannya PKL di Kota Semarang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya mendirikan kios permanen di atas saluran, di atas tanah negara, tidak membongkar tenda setelah selesai berjualan, tidak menjaga

kebersihan tempat setelah selesai berjualan, hal seperti ini terdapat di berbagai sudut kota, sehingga menyebabkan berbagai faktor yang harus segera diselesaikan. Salah satu faktor tersebut adalah mengganggu lalu lintas jalan terutama trotoar, kebersihan kurang begitu diperhatikan oleh PKL dan keindahan kota semakin tidak nyaman dipandang dengan adanya tenda-tenda PKL yang tidak dibongkar dan tenda-tenda yang semipermanen/permanen. Dengan adanya hal tersebut, maka Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL harus segera direalisasikan oleh seluruh aparat yang terkait.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL pada Bab V memuat Hak, Kewajiban dan Larangan PKL antara lain:

- a. Pasal 6, Setiap PKL mempunyai hak:
  - 1) Mendapatkan pelayanan perijinan
  - 2) Penyediaan lahan lokasi PKL
  - 3) Mendapatkan pengaturan dan pembinaan
- b. Pasal 7, Untuk melakukan kegiatannya PKL diwajibkan:
  - 1) Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan
  - 2) Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
  - 3) Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran
  - 4) Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya
  - 5) Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah
  - 6) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Pasal 8, Untuk melakukan kegiatannya PKL dilarang:
  - 1) Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah
  - 2) Mendirikan Bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan

- 3) Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain
- 4) Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan
- 5) Menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota
- 6) Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian)

Tujuan Program Pengaturan dan Pembinaan PKL adalah untuk meningkatkan kesadaran PKL dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan mentaati peraturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dirumuskan definisi konsep mengenai keberhasilan pelaksanaan program pengaturan dan pembinaan PKL adalah besarnya sumbangan, jangkauan, perubahan perilaku dan partisipasi PKL dalam pengaturan dan pembinaan PKL.

## 2. Ketentuan Umum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Semarang No. 511.3/ 16 Tahun 2001

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang menjadi imbalan terhadap citranya yang didominasi pedagang ekonomi kuat. Seperti hukum alam, di mana ada sektor formal disitulah akan tumbuh juga sektor informal. Hal ini berarti eksistensi PKL tidak mungkin diabaikan. Dengan berkembangnya sektor informal akan berdampak ada ketertiban dan keindahan kota, salah satunya adalah kendala dalam mewujudkan slogan Kota Semarang sebagai Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat). Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Semarang mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan penataan sektor informal. Peraturan penataan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang

meliputi pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak dan kewajiban para PKL, larangan, pembinaan, ketentuan hukum, dan pengawasan.

Tujuan diterbitkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usaha PKL dengan perijinan
- b. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan dengan adanya pentaan sektor informal.
- c. Terjaminnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya kontribusi retribusi dari sektor informal.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000, terdapat tiga organisasi pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur, yaitu:

- a. Unit Pelaksana Pedagang Kaki Lima (UP PKL).
- b. Kecamatan, yang berwenang memberikan izin mendirikan usaha PKL di wilayahnya masing-masing.
- c. Kelurahan, yang berwenang menarik retribusi kepada PKL di wilayahnya masing-masing.

#### **4.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur**

Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL, di Kecamatan Semarang Timur dikomandani oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Semarang Timur. Tugas yang diemban ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi seksi Ketentraman dan Ketertiban, yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan perparkiran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam upaya melakukan pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Semarang Timur, aparat seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Semarang Timur selalu berpedoman pada Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000, SK Walikota Semarang No.16 Tahun 2001 dan Surat Perintah Walikota Semarang NO.200/2019 tanggal 24 Mei 2002 tentang Larangan Pendirian PKL.

Selama Tahun 2012 s/d 2016 telah dilakukan kegiatan operasi yustisi terhadap para PKL yang melanggar jam buka-tutup dasaran dan yang tidak membongkar tenda setelah berjualan. Operasi yustisi ini dilakukan kepada semua PKL baik yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang maupun yang tidak. Adapun mekanisme penertiban yaitu pertama kali kepada PKL yang melanggar ketentuan yang berlaku, langsung diberikan pengertian tentang pelanggaran yang mereka lakukan dan sekaligus diberikan pula surat teguran I (pertama). Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan PKL tidak mengindahkan surat teguran pertama, maka langsung diberikan surat teguran II (kedua) hingga surat teguran III (ketiga). Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan surat teguran ketiga juga tidak diindahkan, maka akan langsung dilakukan tindakan berupa penertiban secara paksa.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, dilibatkan juga seluruh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan atau petugas yang menangani dengan didampingi oleh Kepala Kelurahan di mana penertiban tersebut dilakukan. Operasi yustisi yang dilakukan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Semarang Timur sekarang ini lebih mengarah kepada PKL

yang baru menempati lokasi atau lahan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang. Operasi juga ditujukan kepada PKL yang menempati lokasi atau lahan yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang namun tidak terdaftar dalam register PKL Kelurahan/ Kecamatan.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap PKL yang dilakukan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Semarang Timur adalah dengan mengadakan pertemuan atau rapat antara PKL dan aparat Kecamatan Semarang Timur di balai-balai kelurahan atau langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan agar para PKL dalam menjalankan usahanya tetap mematuhi aturan-aturan yang mengatur PKL mulai dari jam buka-tutup, bongkar-pasang tenda hingga masalah retribusi.

Di samping itu, bentuk pembinaan lain adalah dengan mengajak para PKL yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur untuk ikut bersama-sama peduli pada lingkungan dengan melaksanakan kerja bakti bersama membersihkan lingkungan sekitar PKL agar bebas dari sampah. Ditekankan pula dalam kerja bakti tersebut, setiap PKL harus mempunyai tempat sampah sendiri agar produk sampah yang dihasilkan tiap hari dapat langsung dibuang ke tempat pembuangan sementara yang selanjutnya akan dibuang ke TPA Jatibarang.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang didukung dari sumber-sumber dana yang dikelola Pemkot Semarang. Salah satu di antaranya adalah retribusi PKL yang dipungut oleh Kelurahan lewat juru pungut. Retribusi yang ditarik dari para PKL hari itu langsung disetorkan ke Kas Daerah Kota Semarang. Hal ini dilakukan agar tidak ada pengendapan uang retribusi PKL di Kelurahan. Sebagai

bukti bahwa Kelurahan telah menyerahkan uang retribusi tersebut, setiap membuat laporan disertai dengan bend 17 (penyetoran ke Kas Daerah Kota Semarang).

Sesuai dengan penjelasan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000, jenis retribusi yang dipungut atas kegiatan PKL adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Kebersihan. Sebagai akibat pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di Kota Semarang, salah satu tugas dan kewajiban dari Pemkot Semarang yang dibebankan oleh Kecamatan maupun Kelurahan adalah register atau pendataan bagi para PKL.

Dikarenakan letak Kecamatan Semarang Timur yang sangat strategis yaitu berada di tengah kota dan pusat perkantoran sehingga menjadi magnet bagi warga baik penduduk asli maupun pendatang untuk mencari penghasilan, maka pertumbuhan PKL di Kecamatan Semarang Timur sangat cepat. Oleh karena itu, dilakukan pendataan atau registrasi terhadap para PKL. Pendataan ini berguna untuk mengetahui pemilik usaha yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengeluaran ijin pemakaian tempat dasaran yang berlaku selama satu tahun. Pendataan atau register ini dilaksanakan oleh petugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Semarang Timur.

Salah satu masalah yang sering terjadi misalnya mereka tidak mau mengemasi dasaran sesuai jualan, atau membuang sampah sembarangan, yang efeknya estetika kota menjadi tidak indah. Padahal masyarakat pasti juga menginginkan agar estetika kota terjaga. Instansi tersebut sebenarnya menginginkan mereka tidak hanya berjualan di tempat ramai. Mereka diharapkan

menjadi magnet baru yang menciptakan keramaian meski lokasinya tidak di tengah kota. Saat ini sudah ada beberapa tempat di mana keberadaan PKL mulai tumbuh subur.

Dalam kenyataannya di lapangan, komunikasi kebijakan pembinaan PKL di Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Bugangan dan Kelurahan Kemijen ini mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain karena pada saat aparat datang untuk mendata atau memberikan pembinaan rata-rata pedagang beralasan sedang sibuk untuk melayani pembeli dan mengatakan tidak mempunyai waktu. Jadi disini tidak ada kesempatan dari aparat untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap tujuan program. Para pedagang merasa waktunya tidak tepat apabila aparat datang untuk melakukan pendataan sehingga aparat merasa diacuhkan dan tidak dianggap oleh para pedagang.

Selain itu Dinas Pasar Kota Semarang dan PKL juga merasa kesulitan untuk mengumpulkan para pedagang apabila akan diberikan penyuluhan atau pengarahan. Karena selain waktu berdagang mereka yang berlainan, mereka juga enggan untuk diajak berkumpul karena mereka beranggapan kalau mereka mau dikumpulkan akan didata dan harus membayar retribusi yang lebih. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa PKL selama ini cenderung tidak ambil pusing dan berpikiran negatif terhadap penataan PKL. Para pedagang merasa mereka telah melakukan kewajibannya tetapi selalu saja dipermasalahkan mengenai permasalahan-permasalahan yang lainnya.

Persoalan lain yang juga melatarbelakangi adalah partisipasi pedagang yang sangat tidak mendukung adanya kebijakan perda tersebut. Mereka tidak mau

menaati ketentuan yang ada dalam perda tersebut, masih banyak pedagang yang dengan seenaknya mendirikan kios di atas tanah negara walaupun disitu sudah tertera tulisan yang isinya tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah ini, tetapi kenyataanya lain pedagang nekat mendirikan kios di atas tanah tersebut mereka beranggapan bahwa petugas tidak pernah menegur maupun menggusur kios tersebut. Selain itu pedagang juga mendirikan kios di atas saluran, dan tidak pernah membongkar tenda pada saat mereka selesai berjualan akibatnya pemandangan menjadi kumuh dan terkesan kotor. Para pedagang melakukannya karena mereka merasa akan kerepotan lagi apabila waktunya untuk berdagang tiba. Sedangkan para aparat juga sudah enggan untuk menegur pedagang yang nekat.

Kepala Dinas Pasar ini bukannya tidak percaya kalau mereka tidak bisa ditertibkan. Dia berkali-kali mengatakan, mereka pasti bisa ditertibkan. Namun itu tidak hanya menjadi tanggungjawab dinas tersebut. Kesadaran dan partisipasi pedagang dan masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka tidak boleh sembarangan berjualan ditempat semua tempat. Ada beberapa wilayah yang tidak boleh dipakai sesuai Peraturan Daerah dan SK Wali Kota.. Dia mencontohkan, alangkah baiknya warga saling mengingatkan. Menurutnya, arena jalan juga merupakan fasilitas umum juga. “Kami berterima kasih kalau ada ada pihak lain yang juga mempunyai kepedulian menata mereka, seperti dilakukan Undip,” tambahnya. Ke depan, pihaknya akan bertindak lebih disiplin dan tegas.

Praktisi hukum menilai Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum mengakomodir asas kemanusiaan dan

keadilan. Sekretaris Dewan Kehormatan KP2KKN Dwi Saputro, menganjurkan agar Perda itu segera direvisi, sebab selama ini pelaksanaannya mengandung banyak persoalan. Prinsip keadilan, kata dia bisa dilakukan dengan mengganti para pengusaha PKL yang sudah mapan dan kaya dengan PKL marginal. “PKL yang sudah berhasil seharusnya tidak lagi berjualan di Simpang Lima,” katanya dalam Diskusi Rembug Semarang bertema “Identifikasi Problematika Kota Semarang dan Alternatif Solusi Penyelesaiannya, Studi Kasus PKL Kawasan Simpanglima. Menurut Dwi, sudut pandang kemanusiaan dan keadilan harus dimasukkan ke dalam Perda tersebut. Prinsip kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan PKL dalam setiap penentuan kebijakan terkait hajat hidup PKL.

Pihaknya menilai komitmen Pemkot dalam pengaturan PKL masih lemah. Selama ini PKL diharuskan membayar retribusi kebersihan sebesar Rp.100-150/hari, retribusi dasar Rp. 1.000- 2500/m<sup>2</sup>. Namun di sisi lain PKL resah, karena terancam digusur. Selain itu kebijakan Pemkot seringkali saling tumpang tindih. Sejumlah PKL yang hadir dalam acara itu juga minta suara mereka ikut didengarkan. Para pedagang itu mengaku takut jika tiba-tiba satpol PP atau Polisi menggaruk dasar mereka. “*Kula sak kanca niku ajrih menawi miring badhe wonten penggusuran, pak,*” ujar Purnomo, salah satu seorang PKL di Kelurahan Bugangan. Penggusuran, menurut Purnomo merupakan momok bagi para pedagang. Mereka berharap Pemkot Semarang tidak lagi melakukan cara-cara penggusuran untuk menertibkan PKL.

Sebagaimana dikatakan oleh Purnomo bahwa: ”kalau dampak pertama

memang betul jumlah lahan jadi terbatas, jadi pemerintah saya lihat banyak membatasi lahan untuk jadi lokasi PKL, bahkan saya lihat banyak terjadi penggusuran, namun di sisi ketertiban sudah ada kemajuan yang cukup baik, tapi masalah penggusuran seharusnya sudah jadi tanggung jawab pemerintah untuk mengganti dengan lokasi lain sehingga tidak mengurangi pendapatan PKL, tidak mematikan ekonomi PKL dan antusias masyarakat untuk berdagang kaki lima”.

Ketidaktegasan Pemerintah Daerah dalam menertibkan PKL akan berakibat semakin banyak PKL-PKL liar/tidak mempunyai izin untuk berjualan, yang menjual dagangannya pada ruas-ruas jalan yang sebenarnya dilarang. Akibatnya, wilayah publik menyempit, dan tidak tersedianya tempat bagi pejalan kaki dan mengurangi kebersihan dan keindahan kota. Tidak adanya izin formal akan berakibat sulitnya pendataan tentang kepastian jumlah PKL hal ini mengakibatkan ketidaktepatan dalam penentuan target retribusi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Permasalahan lain yang timbul adalah munculnya pertentangan-pertentangan kepentingan antara elite politik dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan akibat menjamurnya PKL. Hal ini memberikan arahan mengenai masih belum padunya dukungan elite terhadap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000, yang khususnya menyangkut struktur birokrasi dan disposisi.

Secara empiris juga ditemukan masih kurang optimalnya faktor komunikasi kebijakan pembinaan PKL di Kelurahan Rejomulyo, Bugangan dan Kemijen ini mengalami berbagai hambatan, seperti; a) karena pada saat aparat datang untuk mendata atau memberikan pembinaan rata-rata pedagang beralasan sedang sibuk

untuk melayani pembeli; b) mengatakan tidak mempunyai waktu. Jadi di sini tidak ada kesempatan dari aparat untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap tujuan program; c) Para pedagang merasa waktunya tidak tepat apabila aparat datang untuk melakukan pendataan sehingga aparat merasa di acuhkan dan tidak dianggap oleh para pedagang. Faktor komunikasi ini berkaitan dengan cukup erat dengan variabel sumberdaya yang terlibat, baik di saat penataan, pengaturan maupun pembinaan, yaitu di samping kurang optimalnya faktor komunikasi, maka hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurang kapabelnya sumberdaya yang mengimplementasi kebijakan di lapangan.

Di samping kekurangberhasilan pada aspek komunikasi dan sumberdaya, maka aspek struktur birokrasi juga masih memerlukan pembenahan. Hal ini terbukti dari adanya fenomena bahwa selama ini Dinas Pasar Kota Semarang dan PKL juga merasa kesulitan untuk mengumpulkan para pedagang apabila akan diberikan penyuluhan atau pengarahan. Karena selain waktu berdagang mereka yang berlainan, mereka juga enggan untuk diajak berkumpul karena mereka beranggapan kalau mereka mau dikumpulkan akan didata dan harus membayar retribusi yang lebih. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa PKL selama ini cenderung tidak ambil pusing dan berpikiran negatif terhadap penataan PKL. Para pedagang merasa mereka telah melakukan kewajibannya tetapi selalu saja dipermasalahkan mengenai permasalahan-permasalahan yang lainnya.

Persoalan lain yang juga melatarbelakangi adalah partisipasi pedagang yang sangat tidak mendukung adanya kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Mereka tidak mau menaati ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah, serta masih



banyak pedagang yang dengan seenaknya mendirikan kios di atas tanah negara walaupun disitu sudah tertera tulisan yang isinya tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah ini, tetapi kenyataanya lain pedagang nekat mendirikan kios di atas tanah tersebut mereka beranggapan bahwa petugas tidak pernah menegur maupun menggusur kios tersebut. Selain itu pedagang juga mendirikan kios di atas saluran, dan tidak pernah membongkar tenda pada saat mereka selesai berjualan akibatnya pemandangan menjadi kumuh dan terkesan kotor. Para pedagang melakukannya karena mereka merasa akan kerepotan lagi apabila waktunya untuk berdagang tiba. Sedangkan para aparat juga sudah enggan untuk menegur pedagang yang nekat.

Penilaian-penilaian tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur khususnya, dan Kota Semarang pada umumnya memberikan arahan bahwa perhatian yang serius terhadap masalah penertiban dan pengelolaan PKL ini merupakan suatu hal yang sangat penting, demikian juga tindakan yang tegas dari Pemerintah Daerah Kota Semarang. Tindakan yang segera dan tegas ini sangat diperlukan mengingat permasalahan tentang PKL ini dapat mengakibatkan permasalahan yang serius bagi Manajemen Perkotaan. Permasalahan tentang PKL ini merupakan permasalahan yang banyak dijumpai diberbagai daerah, baik kota kecil maupun kota besar. Penanganan yang serius terhadap PKL merupakan upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya lingkungan perkotaan yang tidak teratur, padat dan kumuh.

Bagaimanapun, masyarakat Indonesia selama ini bukan hanya dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik, namun lebih dari itu, masyarakat Indonesia

terdiri dari banyak kelas (suatu tatanan yang berdasarkan strata ekonomi). Hadirnya suatu kebijakan yang tepat akan menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menghindari friksi dan konflik yang mungkin dapat dengan mudah timbul karena perbedaan-perbedaan tersebut.

Peninjauan kembali terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang diberlakukan sangat perlu agar permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari bertambah banyaknya jumlah PKL tidak semakin meluas serta berdampak buruk, untuk itu diperlukan analisis terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Wilayah Kota Semarang.

Faktor penghambat yang teridentifikasi secara empiris serta relevan dengan model implementasi Grindel dalam kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur, antara lain:

1. Terakomodirnya kepentingan PKL termuat dalam isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000

Upaya akomodasi suara warga masyarakat dan para PKL dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan komunikasi. Pertukaran komunikasi yang terjalin antara Pemerintah kota kepada Dinas Perdagangan kepada kelompok sasaran terkait program relokasi PKL, karena program relokasi sendiri memerlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Relokasi sendiri merupakan bagian implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 yang wajib dijalankan dan dituangkan melalui SK Walikota Nomor 511.3/16

Tentang Penetapan Lahan Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang agar keberadaan PKL dapat tertata di tempat yang telah ditunjuk oleh Walikota.

Faktor penghambat yang masih dapat ditemukan terkait akomodasi suara warga masyarakat dan para PKL tersebut adalah terkait dengan perencanaan yang kurang strategis serta kurangnya koordinasi, sedangkan faktor pendukung ditemui adalah instansi memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik namun fakta di lapangan terkendala oleh dana anggaran yang belum turun, sehingga program relokasi tertunda.

## 2. Tingkat Dukungan Sumberdaya yang memadai terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000

Kualitas sumber daya manusia menurut model implementasi Grindle, dilihat dari kecakupan SDM implementator itu sendiri, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Dalam hal ini SDM merupakan unsur penting dalam suatu implementor kebijakan agar di setiap pelaksanaan programnya dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan rencana.

Sumberdaya manusia disini merupakan SDM implementor yaitu pelaku yang menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tersebut unit teknisnya sendiri yaitu Dinas Perdagangan (dahulu: Dinas Pasar) yang bertugas mengatur dan membina PKL dan Satpol PP yang bertugas mengurus penegakan hukum dan pelanggaran PKL serta eksekusi relokasi PKL, yang keduanya sama-sama penting dan sama-sama berpengaruh dalam

menata wajah kota dari PKL yang bermasalah. Jumlah SDM di kedua instansi tersebut sangat mempengaruhi jalannya program/kegiatan PKL, karena pada umumnya Dinas Perdagangan Kota dan Dinas Satpol PP lah yang turun langsung dalam segala kegiatan PKL. Dilihat dari segi kuantitas petugas yang melakukan pengawasan, masih dirasakan sangat kurang.

Faktor penghambat masih ditemui dari sisi dukungan sumber daya sendiri adalah SDM pada sisi Dinas Perdagangan yang mana jumlahnya kurang memadai, serta jauh dari kata cukup untuk menangani permasalahan PKL di 16 kecamatan di Kota Semarang umumnya, dan Kecamatan Semarang Timur pada khususnya. Apabila dilihat dari sisi anggaran sendiri Pemerintah Kota Semarang belum bisa sepenuhnya mandiri hingga sekarang masih bergantung dengan APBD Provinsi. Hal ini menandakan dana yang diperlukan untuk menangani PKL di seluruh Kota Semarang benar-benar membutuhkan dana yang sangat besar, dan hingga sekarang pun Pemerintah Kota Semarang masih dikatakan kekurangan dana khususnya untuk implementasi pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang.

### 3. Ketepatan Posisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL

Terkait ketepatan dan kesesuaian posisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dapat dimaknai bahwa ada 3 (tiga) aspek yang dapat diukur dalam ketepatan posisi dimplementor dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL. **Pertama**, persepsi pelaksana, dalam kaitannya dengan kebijakan penataan dan

pembinaan PKL, para pelaksana program seperti seluruh jajaran Dinas Perdagangan memiliki persepsi yang baik terkait pengaturan PKL ini. Berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, instansi yang terkait dalam kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dalam implementasinya sangat minim terjadi *conflict of interest*. **Kedua**, terkait dengan respon pelaksana, baik anggota Dinas Perdagangan dan Satpol PP merespon dengan baik apa yang telah menjadi intruksi baik dari Pemerintah Kota sendiri maupun langsung dari Walikota. **Ketiga**, terkait dengan tindakan para pelaksana di kelurahan, camat, Dinas Perdagangan, Satpol PP, maupun PKL mempunyai sikap yang baik dan berkomitmen baik dalam melaksanakan program pengaturan dan pembinaan PKL. Berbagai elemen tersebut menjadi faktor pendukung bahwa ketepatan dan kesesuaian posisi masing-masing pihak yang terlibat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, sangat membantu pelaksanaan program pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang.

#### 4. Tingkat kekuasaan dan karakter rezim

Secara keseluruhan program pengaturan dan pembinaan PKL ini didukung tingkat kekuasaan dan karakter rezim yang berkuasa sebagai salah satu faktor pendukung pelaksanaan program. Dalam program pengaturan dan pembinaan PKL ini struktur yang terjadi yaitu Walikota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, Lurah/Camat setempat, Satpol PP Kota Semarang, Pedagang Kaki Lima dan masyarakat. Dalam posisi struktur di atas Dinas Perdagangan dan Lurah/Camat per wilayah sebagai pihak pertama yang

harus benar-benar perhatian terhadap dari program tersebut.

Faktor pendukung yang dapat ditemukan dari sisi karakteristik rezim adalah struktur birokrasi tidak cukup panjang sehingga menjadikan prosedur birokrasi menjadi mudah dan tidak rumit yang pada akhirnya aktivitas organisasi menjadi fleksibel, serta lentur dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang terus berubah seiring perkembangan jaman yang semakin maju.